

## PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

Rully Pongsikabe<sup>1</sup>

Yundy Hafizrianda<sup>2</sup>

yundihafizrianda@feb.uncen.ac.id

Joddy E. H. Siahainenia<sup>3</sup>

Dominggus Marey<sup>4</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya pengaruh langsung dan tidak langsung dari Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi ditandai dengan adanya peningkatan mutu pelayanan publik dan meningkatnya kegiatan ekonomi di suatu daerah. Semakin besar porsi Belanja Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah maka akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan mempengaruhi keterlibatan/partisipasi masyarakat terhadap sektor ekonomi akan meningkat pula yang mana akan memberi dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari organisasi perangkat daerah dan juga instansi vertical berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2010 – 2016 menyangkut Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Badan Pusat Statistik Provinsi Papua berupa realisasi Produk Domestik Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi. Dalam penelitian ini perangkat analisis yang dipakai adalah analisis jalur (path analysis) yang merupakan perluasan dari regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS 20 (Statistical Package for Sosial Sciences). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh langsung Belanja Modal (x1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 0.119, dan pengaruh tidak langsung Belanja Modal melalui Pendapatan Asli Daerah (x2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 0.127. pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah (x2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 0.604 dan pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal (x1) adalah sebesar 0.127 dengan total pengaruh adalah 0.977 atau sama dengan besarnya nilai R Square (R<sup>2</sup>).

**Kata Kunci : Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi**

### PENDAHULUAN

Pemberian kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk pertimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Sejalan dengan pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diikuti dengan pemberian dana perimbangan yang merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang

---

<sup>1</sup> Alumni Program S1 Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

<sup>2</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

<sup>3</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

<sup>4</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dimana Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-daerah. Selain dana perimbangan tersebut dalam struktur pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan (dana hibah dan darurat)

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat berkreasi dan berinovasi dalam menggali potensi sumberdaya yang dimilikinya sebagai sumber pendapatan guna kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mencapai tujuan dimaksud, pemerintah daerah lebih menitik beratkan pada pembangunan infrastruktur dan pemberian fasilitas modal untuk meningkatkan daya tarik investasi melalui pergeseran alokasi belanja dalam postur belanja dimana belanja modal mendapatkan porsi lebih besar dengan harapan dapat menaikkan kapasitas fiskal daerah.

Pembangunan adalah suatu proses untuk mencapai kesejahteraan pada tingkat yang lebih tinggi dan serba sejahtera atau dengan kata lain pembangunan merupakan suatu rangkaian proses perubahan menuju keadaan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana salah satu indikator keberhasilan pembangunan diantaranya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah. Dalam konteks wilayah, pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menunjukkan makin meningkatnya aktivitas perekonomian di wilayah tersebut.

Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan output per kapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti, bahwa dalam jangka panjang, kesejahteraan masyarakat tercermin pada peningkatan output perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik tingkat kabupaten/ kota maupun di tingkat provinsi. Badan Pusat Statistik (2016) menyebutkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Kabupaten Mamberamo Tengah merupakan salah satu kabupaten baru di Provinsi Papua hasil pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2008 dan baru memiliki kepala daerah deventif pada tahun 2013 hasil pemilihan langsung yang demokratis oleh masyarakat di Kabupaten Mamberamo Tengah. Secara topografi Kabupaten Mamberamo Tengah sangat bervariasi mulai dari daerah datar sampai bergunung-gunung dengan ketinggian antara 1.300 m – 1.700 m dpl dengan kemiringan lahan antara 0 – 15 % seluas 186.984,51 Ha (40 %), kemiringan 15% - 40% seluas 215.428,47 Ha (53 %) dan kemiringan 40% ke atas seluas 6.216,55 Ha (1,52%) serta aksesibilitas antar distrik masih menggunakan moda transportasi udara (pesawat kecil) yang menyebabkan tingkat kemalahan harga sangat tinggi, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan tentunya membutuhkan anggaran dalam jumlah yang besar.

Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal dapat mempengaruhi meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dari kegiatan perekonomian dimana hal tersebut berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat (Putro et al, 2010: 9). Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai melalui pelaksanaan otonomi daerah karena memberikan keleluasaan kepada pemda untuk mengurus, mengembangkan, dan menggali potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Bila dilihat dari perekonomian daerah, Kabupaten Mamberamo Tengah memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi relative baik dari tahun 2010 – 2012 mengalami kenaikan yaitu sebesar 16.39 persen, namun tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamberamo Tengah mengalami perlambatan 10.89 persen dari tahun sebelumnya sampai pada tahun 2016 sebesar 5.73 persen, walaupun nilai rupiah mengalami pertumbuhan ditahun 2016 sebesar 644.35 milyar rupiah. Menurunnya pertumbuhan ekonomi ini bukan berarti menurunnya nilai PDRB yang dihasilkan oleh

Kabupaten Mamberamo Tengah, namun penciptaan nilai tambah yang dihasilkan tidak dapat sebesar tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan karena tingkat kemahalan harga di Kabupaten Mamberamo Tengah yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten dan kota se Provinsi Papua dimana pada tahun 2016 Kabupaten Mamberamo Tengah berada pada urutan ketiga dengan indeks kemahalan konstruksi sebesar 344,97 setelah Kabupaten Puncak dan Intan Jaya.

Dengan kondisi yang demikian membuat pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah berupaya semaksimal mungkin menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah untuk pengejar ketertinggalan dan keterisolasian daerah guna peningkatan pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat dengan menekankan pada lima (5) skala prioritas pembangunan yakni bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan lainnya.

Penekanan lima (5) bidang skala prioritas tersebut dijabarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui belanja modal antara lain; belanja modal pengadaan tanah, pembangunan sarana perkantoran, pembangunan rumah bagi masyarakat, pembangunan jaringan jalan, drainase dan air bersih, pembangunan kios dan pasar distrik, pengadaan bibit dan sarana prasarana pertanian dan peternakan/perikanan, pengadaan sarana transportasi perdesaan baik darat maupun angkutan sungai bagi masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan serta pembangunan sarana ibadah.

Belanja modal daerah sangat berpengaruh terhadap investasi bagi daerah dengan asumsi belanja modal dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang diikuti dengan adanya pertumbuhan ekonomi sebagai bukti keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2010 - 2016 mengalami peningkatan PAD dimana pada tahun 2010 sebesar Rp. 768.926.540,- dan tahun 2016 sebesar Rp. 14.380.797.668,- hal ini disebabkan karena kontribusi terbesar terhadap pembentukan PAD adalah dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sedangkan retribusi daerah dan pajak daerah belum memberikan kontribusi terhadap pembentukan PAD mengingat belum adanya produk hukum daerah tentang pajak dan retribusi daerah atau masih bersifat rancangan. Yuliana (2014), meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, selain itu Darwanto dan Yustikasari (2007) memperoleh hasil bahwa PAD dan belanja modal memiliki hubungan yang positif, semakin tinggi PAD suatu daerah, maka belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah juga semakin meningkat.

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam tulisan ini, adalah untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamberamo Tengah. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui berapa besar pengaruh langsung dan tidak langsung dari belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamberamo Tengah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Belanja Modal**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 53 ayat (1), Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dan 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. (2) Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja modal yang besar merupakan gambaran dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun oleh Pemerintah Daerah. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Sugiono (2014) melihat ada pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Begitu pula Darsono (2013) melihat ada pengaruh positif belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah walaupun tidak signifikan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri dari Belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam belanja langsung dikelompokkan menurut jenis belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Menurut Halim (2008) belanja modal merupakan pengeluaran untuk memperoleh aset yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Yang termasuk belanja modal;

- 1) Belanja tanah, merupakan pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sampai tanah tersebut siap digunakan.
- 2) Belanja peralatan dan mesin, adalah biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor serta manfaatnya lebih dari satu tahun.
- 3) Belanja modal gedung dan bangunan, pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian termasuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung tersebut dalam kondisi siap pakai.
- 4) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan/ pembangunan/ pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan tersebut dalam kondisi siap pakai.
- 5) Belanja aset tetap lainnya, pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahann/ penggantian/ peningkatan/ pembangunan/ pembuatan serta perawatan, terhadap fisik lainnya. Yang termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal untuk kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku serta jurnal ilmiah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006, tanggal 3 April 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Lampiran I-A.3 laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten/kota, yang termasuk Belanja Modal adalah : belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya. Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap yang berwujud yang nilai manfaatnya melebihi dan setahun dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program atau kegiatan pemerintahan daerah. Pembentukan aset tetap meliputi alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mobil air, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan. Adapun jenis-jenis dari belanja modal :

- 1) Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan

- pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksudkan dalam kondisi siap pakai.
  - 5) Belanja Modal Fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria 14 belanja modal tanah, peralata dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang peurbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada pasal 5 ayat 2 bahwa pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan, lebih lanjut pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud desentralisasi.

Bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun jenis pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- 1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok.
- 2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### **Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk investasi publik. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah : pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah.

Halim dalam Edison (2009:34) menyatakan Pajak Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari pajak. Lebih lanjut Simanjuntak dalam Edison (2009:34) menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh daerah-daerah seperti propinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya masing-masing. Kesit dalam Edison (2009:34) menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Wewenang mengenakan pajak atas penduduk untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsur penting dalam pemerintahan daerah. Diungkapkan oleh Devas et.al dalam Edison, (2009:35) bahwa sistem perpajakan yang dipakai sekarang ini banyak mengandung kelemahan, dan tampaknya bagian terbesar dari pajak daerah lebih banyak menimbulkan beban daripada menghasilkan penerimaan bagi masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu melakukan perubahan sistem pajak daerah merupakan langkah logis untuk langkah berikutnya.

Pembaharuan yang dilakukan pemerintah misalnya dengan diterbitkannya UU No. 34 Tahun 2004 tentang pajak dan retribusi sebagai perubahan UU No. 18 Tahun 1997. Dengan diberlakukannya UU No. 34 Tahun 2004 ini jenis pajak daerah jumlahnya menjadi berkurang. Terakhir pemerintah menerbitkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan tentang pembagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pembagian berbagai penerimaan Negara. Davey dalam Edison (2009:35) menjelaskan bahwa keberhasilan dalam mengelola sumber-sumber penerimaan pajak daerah tergantung pada kemampuan pemerintah daerah itu sendiri dalam mengoptimalkan faktor-faktor yang turut menentukan keberhasilan tersebut. Devas et. Al dalam Edison, (2009:36) memberikan penjelasan bahwa kemampuan menghimpun dana adalah perbandingan antara penerimaan dari pajak dengan retribusi atau disebut dengan upaya (tax effort)

Mardiasmo dkk dalam Edison, (2009:36) mengungkapkan bahwa untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah perlu diberikan otonomi dan keleluasan daerah. Langkah penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah dengan menghitung potensi penerimaan pajak daerah yang riil yang dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga bisa diketahui peningkatan kapasitas pajak (tax capacity) daerah. Peningkatan kapasitas pajak pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

### **Retribusi Daerah**

Pemungutan retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanannya. Besarnya retribusi seharusnya (lebih kurang) sama dengan nilai layanan yang diberikan. Menurut Sumitro dalam Edison (2009:36) Retribusi ialah pembayaran pada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa. Lebih lanjut Syamsi dalam Edison (2009:37) mengatakan bahwa: Retribusi adalah iuran masyarakat tertentu (individu yang bersangkutan) yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya ditunjuk secara langsung, dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Dengan kata lain yang lebih sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati jasa secara langsung.

Davey dalam Edison (2009:37) mengatakan bahwa Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk Pemerintahan Regional, retribusi tersebut mungkin juga merupakan sumber utama dari pendapatan badan-badan pembangunan daerah. Sedangkan Redjo dalam Edison (2009:37) berpendapat bahwa retribusi ialah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang diterima langsung dengan adanya pembayaran retribusi tersebut, misalnya uang langganan air minum, uang langganan listrik dan lain-lain. Koswara (2009:37) menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah imbalan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung seseorang atau badan atau jasa layanan, pekerjaan, pemakaian barang, atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Simanjuntak dalam Edison (2009:37) menyatakan bahwa retribusi daerah merupakan iuran rakyat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa balik atau kontra prestasi dari pemerintah yang secara langsung ditunjuk. Mengenai potensi Retribusi Daerah, Koswara dalam Edison (2009:38) memaparkan bahwa seperti halnya dengan pajak daerah, hanya dengan beberapa jenis retribusi yang secara efektif berperan sebagai sumber pendapatan daerah. Walaupun demikian Devas et. Al dalam Edison, (2009:38) mengatakan bahwa Retribusi merupakan sumber pendapatan yang sangat penting dan hasil retribusi hampir mencapai setengah dari seluruh pendapatan daerah. Dalam dimensi potensi daerah yang demikian itu, pemerintahan daerah hendaknya dapat mengembangkan inisiatif dan upaya untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah. Upaya ini antara lain dilakukan dengan cara memberikan pelayanan publik secara profesional dan mampu memberikan kepuasan kepada setiap penerimaan pelayanan.

Davey dalam Edison (2009:38) mengungkapkan beberapa pendapat mungkin akan timbul pada elastisitas retribusi yang harus responsive kepada pertumbuhan penduduk dan pendapatan. Hal ini umumnya dipengaruhi oleh pertumbuhan permintaan atau konsumsi akan suatu pelayanan. Dalam konteks yang demikian itu, pengelolaan sumber-sumber PAD dari jenis retribusi tentu mempunyai konsekuensi

yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah. Artinya pemerintah daerah tidak boleh memikirkan bagaimana memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya dari pemungutan retribusi, tetapi pemerintah daerah bertanggungjawab atas konsekuensi pemungutan retribusi tersebut.

Sedangkan jenis-jenis retribusi yang diserahkan kepada daerah Tingkat II menurut Kaho berikut ini: Uang leges, Biaya jalan/jembatan/tol, Biaya pangkalan, Biaya penambangan, Biaya potong hewan, Uang muka sewa tanah/bangunan, Uang sempadan dan izin bangunan, Uang pemakaian tanah milik daerah, Biaya penguburan, Biaya pengerukan wc, Retribusi pelelangan uang, Izin perusahaan industri kecil, Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi jembatan timbang, Retribusi stasiun dan taksi, Balai pengobatan, Retribusi reklame, Sewa pesanggrahan, Pengeluaran hasil pertanian, hutan dan laut, Biaya pemeriksaan susu dan lainnya, dan Retribusi tempat rekreasi.

Dari uraian diatas dapat kita lihat pengelompokan retribusi yang meliputi: Retribusi jasa umum, yaitu : retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dan Retribusi jasa usaha, yaitu : retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta.

### **Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu sasaran pembangunan. Pembangunan dalam arti luas mencakup aspek kehidupan baik ideologi, politik, social budaya, pertahanan dan keamanan dan lain sebagainya. Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa sering kali dengan pendapatan riil perkapita. Selanjutnya pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita karena kenaikan merupakan penerimaan dan timbulnya dalam kesejahteraan masyarakat. Laju pembangunan ekonomi suatu Negara diukur dengan menggunakan tingkat pertumbuhan GDP/ GNP.

Menurut Kuznet dalam Todoro (2003: 99) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka Panjang, dari Negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas ditentukan oleh kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional dan ideologis terhadap tuntutan keadaan yang ada. Todoro (2003 : 92) menyampaikan ada tiga factor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. Ketiga fator tersebut adalah; 1) akumulasi modal, yang meliputi bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia; 2) pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja; 3) kemajuan teknologi, berupa cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan (Suardi, 2015:68)

Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Dalam pengertian teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut hanya dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat (Pakin dan Bade, 1995).

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian, dimana dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu Negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Peningkatan ini disebabkan oleh factor-faktor produksi yang selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi juga berkembang dan disamping itu juga tenaga kerja akan bertambah sebagai akibat pertambahan penduduk seiring dengan pengalaman kerja dan pendidikan menambah ketrampilan mereka.

Dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu Negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu Negara (Sukirno, 2002). Terdapat dua periode ketika studi teori pertumbuhan dilakukan secara intensif, dimana periode pertama pada akhir tahun 1950-an sampai 1960-an yang menghasilkan teori pertumbuhan neoklasik dan periode kedua pada akhir tahun

1980-1n sampai tahun 1990-an yang menghasilkan teori pertumbuhan endogenous. Berikut ini adalah dua teori pertumbuhan ekonomi yaitu Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow-Swan dan Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar.

#### **Teori Pertumbuhan Ekonomi Slow-Swan**

Menurut teori pertumbuhan ekonomi Solow-Swan, garis besar proses pertumbuhan mirip dengan teori Harrod-Domar, dengan beberapa proses asumsi yaitu:

- 1) Tenaga kerja (atau penduduk) tumbuh dengan laju tertentu, misalnya P per tahun
- 2) Adanya fungsi produksi  $Q = f(K,L)$  yang berlaku bagi setiap periode.
- 3) Adanya kecenderungan menabung (propensity to save) oleh masyarakat yang dinyatakan sebagai proporsi (s) tertentu dari output (Q). tabungan masyarakat  $S=sQ$ ; bila Q naik S juga naik, dan sebaliknya.
- 4) Semua tabungan masyarakat diinvestasikan;  $S=I=\Delta K$ .

Sesuai dengan asumsi mengenai kecenderungan menabung, maka sejumlah output disisihkan dengan proporsi untuk ditabung dan selanjutnya diinvestasikan. Dengan demikian, maka terjadi penambahan stok capital (Todaro dan Smith, 2009).

#### **Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar**

Teori pertumbuhan Harrod-Domar ini dikembangkan oleh dua ekonom pasca Keynes yaitu Evsey Domar dan Sir Roy F. Harrod. Teori Harrod-Domar ini mempunyai asumsi yaitu:

- 1) Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.
- 2) Perekonomian terdiri dari dua sector yaitu sector rumah tangga dan sector perusahaan
- 3) Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
- 4) Kecenderungan untuk menabung (marginal propensity to save = MPS) besarnya tetap, demikian ratio antara modal – output (capital output ratio = COR) dan ratio pertambahan modal – output (incremental capital-output ratio = ICOR).

Menurut Harrod-Domar setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasional jika hanya untuk mengganti barang-barang modal yang rusak. Untuk menumbuhkan perekonomian, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Hubungan tersebut dikenal dengan istilah ratio modal – output (COR). Untuk menumbuhkan perekonomian, maka kita harus menabung dan menginvestasikan sesuatu proporsi tertentu dari output totalnya. Semakin banyak tabungan dan kemudian diinvestasikan, maka semakin cepat perekonomian itu tumbuh (Lincoln, 2004:64-67).

Menurut Todoro (1977) terdapat tiga atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, dimana ketiga komponen tersebut adalah:

- 1) Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumberdaya manusia.
- 2) Pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah akumulasi capital.
- 3) Kemajuan teknologi.

Masalah pertumbuhan dan pemerataan senantiasa menjadi bahan perdebatan yang tiada habisnya. Kedua hal ini sering dihadapkan dalam sejarah ekonomi. Ada saja kelompok minoritas yang terus bertabrakan dengan kelompok mainstream. Hal ini tidak terkecuali dengan pendapat mereka mengenai kaitan antara pertumbuhan dan pemerataan. Hubungan antara keduanya sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi, disatu ada yang berpendapat sebaliknya.

Menurut Rahardja dan Manurung (2008) faktor pendukung yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Barang Modal. Ekonomi akan tumbuh, jika stok barang modal ditambah. Penambahan stok barang modal dilakukan lewat investasi. Karena itu salah satu upaya pokok untuk meningkatkan investasi adalah menangani faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi. Pertumbuhan ekonomi baru

dimungkinkan jika investasi neto lebih besar daripada nol. Sebab, jika investasi neto sama dengan nol, perekonomian hanya dapat memproduksi pada tingkat sebelumnya. Akan lebih baik lagi, jika penambahan kuantitas barang modal juga disertai peningkatan kualitas.

- 2) Tenaga kerja. Sampai saat ini, khususnya di Negara Sedang Berkembang (NSB), tenaga kerja masih merupakan faktor produksi yang sangat dominan. Penambahan tenaga kerja umumnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan output. Yang menjadi persoalan adalah sampai berapa banyak penambahan tenaga kerja akan terus meningkatkan output. Hal ini sangat tergantung dari seberapa cepat terjadinya The Law of Diminishing Return (TLDR). Sedangkan cepat atau lambatnya proses TLDR sangat ditentukan oleh kualitas SDM dan keterkaitannya dengan kemajuan teknologi produksi. Selama ada sinergi antara tenaga kerja dan teknologi, penambahan tenaga kerja akan memacu pertumbuhan ekonomi.
- 3) Teknologi. Penggunaan teknologi yang makin tinggi sangat memacu pertumbuhan ekonomi, jika hanya dilihat dari peningkatan output. Namun ada trade off antara kemajuan teknologi dan kesempatan kerja. Lebih dari itu, kemajuan teknologi makin memperbesar ketimpangan ekonomi antar bangsa, utamanya bangsa-bangsa maju serta dunia ketiga atau Negara Sedang Berkembang (NSB).
- 4) Uang. Dalam perekonomian modern, uang memegang peranan dan fungsi sentral. Tidak mengherankan makin banyak uang yang digunakan dalam proses produksi, makin besar output yang dihasilkan. Tetapi dengan jumlah uang yang sama, dapat dihasilkan output yang lebih besar jika penggunaannya efisien. Jika terdapat perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki cukup uang, namun memiliki prospek yang baik maka banyak bank atau lembaga keuangan yang mau membantu, misalnya dengan memberikan kredit. Hanya saja minat meminjam, sangat tergantung dari besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan, terutama bunga pinjaman. Sedangkan bunga pinjaman dapat ditekan, jika sistem keuangan berjalan efisien.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua.

### **Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan adalah data hasil wawancara dengan beberapa pimpinan OPD mencakup tendensi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamberamo Tengah. Data sekunder yang dikumpulkan adalah data belanja modal, Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi selama tahun 2010 – 2016. Data sekunder diperoleh dari beberapa sumber yaitu dari publikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti ; Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mamberamo Tengah.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 1). Penelitian lapangan (field research) yakni suatu cara untuk mendapatkan data dengan jalan melakukan penelitian langsung dilokasi penelitian guna mendapatkan data sekunder sesuai variable yang diteliti pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Mamberamo Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mamberamo Tengah dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua. 2). Penelitian kepustakaan (library research) yaitu cara yang dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi lain dari berbagai literature dan atau hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

### **Metode Analisis Data**

- 1) Untuk menganalisis pertumbuhan PAD dan Pertumbuhan Ekonomi digunakan rumus pertumbuhan sederhana sebagai berikut.

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1}}{\text{PAD}_{t-1}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

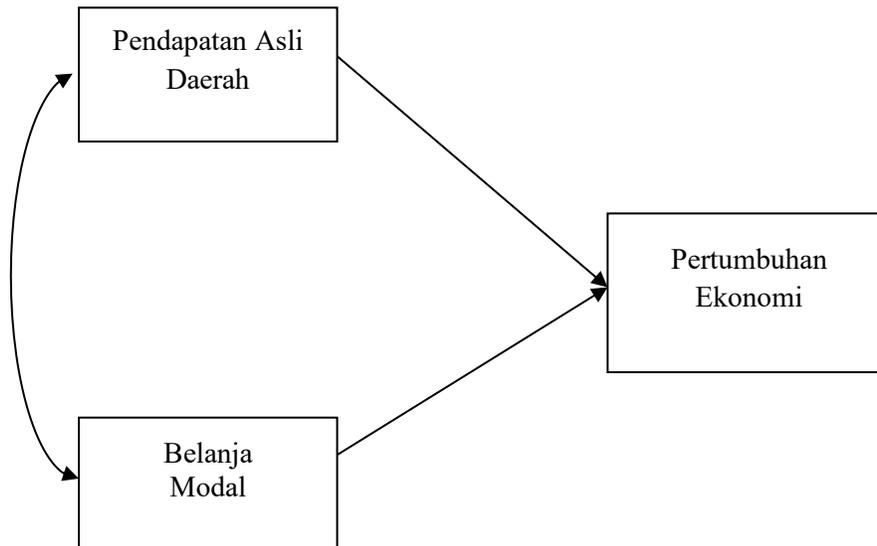
Dimana

PAD adalah Pendapatan Asli Daerah (Rp); PDRB adalah Produk Domestik Regional Bruto (Rp); t adalah tahun sekarang dan; t-1 adalah tahun kemarin

- 2) Adapun perangkat analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung dari belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamberamo Tengah adalah dengan menggunakan analisis jalur (analisis jalur). Menurut Ghozali (2013) bahwa analisis jalur merupakan perluasan dari regresi linear berganda atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksirkan hubungan kausalitas antar variabel (model kausal) yang telah ditetapkan berdasarkan teori. Model analisis jalur digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen). Model analisis jalur yang dibicarakan adalah pola hubungan sebab akibat. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian dalam kerangka analisis jalur hanya berkisar pada variabel bebas (X1, X2, Xk) berpengaruh terhadap variabel terikat Y, atau berapa besar pengaruh kausal langsung, kausal tidak langsung, kausal total maupun simultan seperangkat variabel bebas (X1, X2, Xk) terhadap variabel terikat Y.

**Gambar 1.**

**Diagram Jalur Hubungan Antar Variabel**



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah Kabupaten Mamberamo pada tahun 2010 sebesar 768,926,540, dan pada tahun 2011 naik sebesar 3,464,600,195, tahun 2012 pendapatan asli daerah meningkat lagi sebesar 3,408,806,186, tahun 2013 meningkat sebesar 10,875,939,113. Pada tahun 2014 pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 13,916,753,684, pada tahun 2015 meningkat sebesar 14,203,916,412 dan pendapatan asli daerah kembali meningkat pada tahun 2016 sebesar 14,380,797,668. Setiap tahunnya pendapatan asli daerah selalu mengalami peningkatan yang cukup baik. Dapat dilihat dari pertumbuhan PAD Kabupaten Mamberamo Tengah dari tahun 2010-2016 mengalami fluktuasi dengan rata-rata dibawah sebesar 99.9%.

**Tabel 1.**  
**Perkembangan PAD Kabupaten Mamberamo Tahun 2010 – 2016**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pertumbuhan (%)
2010	768,926,540	-
2011	3,464,600,195	350.6
2012	3,408,806,186	(1.6)
2013	10,875,939,113	219.1
2014	13,916,753,684	28.0
2015	14,203,916,412	2.1
2016	14,380,797,668	1.2

Sumber : Data diolah, 2017

### Perkembangan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, dari belanja daerah pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah terbagi dua yakni belanja tidak langsung dan belanja langsung, dimana belanja tidak langsung diperuntukan untuk belanja pegawai, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab, Kota dan Pemerintah desa dan belanja tidak terduga, sedangkan belanja langsung diperuntukkan bagi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Bila dilihat dari rata-rata persentase realisasi belanja langsung dan tidak langsung terhadap belanja daerah di Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2010-2016 bahwa belanja langsung mempunyai persentase 69 persen sedangkan untuk belanja tidak langsung mempunyai persentase sebesar 31 persen. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.**  
**Perkembangan Belanja Daerah kabupaten Mamberamo Raya, 2010 – 2016**

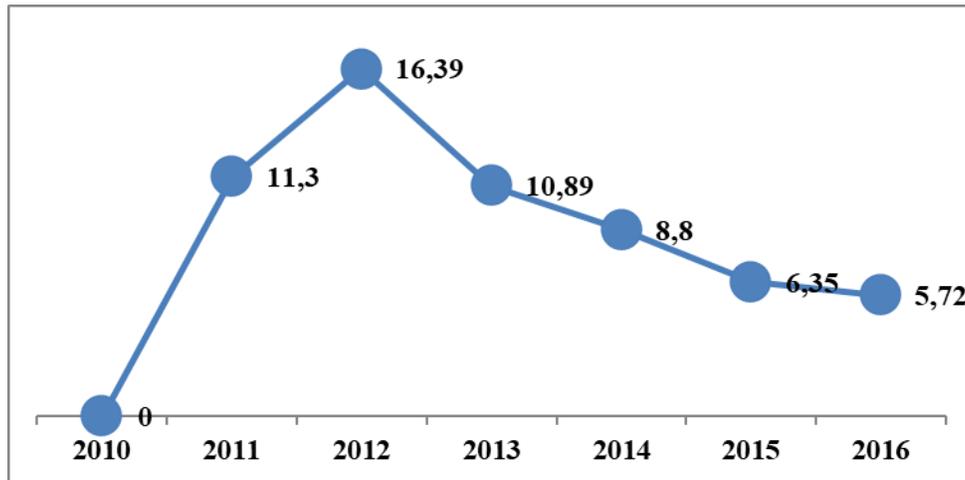
Tahun	Belanja Tidak Langsung		Belanja Langsung		Belanja Daerah (Rp)
	Rp	(%)	Rp	(%)	
2010	96,563,537,803	23,41	315,872,120,124	76,59	412,435,657,927
2011	65,421,483,260	53,22	57,493,916,735	46,78	122,915,399,995
2012	152,286,872,650	27,13	409,108,684,415	72,87	561,395,557,065
2013	166,492,052,660	26,33	465,773,196,059	73,67	632,265,248,719
2014	243,954,504,270	27,42	645,726,477,304	72,58	889,680,981,574
2015	272,425,283,814	28,09	697,547,548,872	71,91	969,972,832,686
2016	375,442,840,533	31,74	807,370,842,789	68,26	1,182,813,683,322

Sumber : BPKAD Kab. Mamberamo Raya, 2017

### Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi

Bila dilihat dari perekonomian daerah, Kabupaten Mamberamo Tengah memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi relative baik dari tahun 2010 – 2016 yaitu sebesar 9,91 %. Adapun laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamberamo Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamberamo Tengah ADHK Tahun 2010-2016 (dalam persen)**



Sumber : Data diolah, 2017

Gambar diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2011 Kabupaten Mamberamo Tengah mengalami pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 11.3 persen dan tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 16,39 persen, tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 10.89 persen hingga pada tahun 2016 sebesar 5.72 persen. Menurunnya pertumbuhan ekonomi ini bukan berarti menurunnya nilai PDRB yang dihasilkan oleh Kabupaten Mamberamo Tengah, namun penciptaan nilai tambah yang dihasilkan tidak dapat sebesar tahun-tahun sebelumnya, dimana kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB mengalami penurunan terutama disektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan galian, real estat, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan jasa lainnya, sedangkan sector yang mengalami peningkatan adalah sector konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan perdagangan, administrasi pemerintahan.

### Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Analisis regresi dipergunakan untuk melihat besarnya hubungan pengaruh variable indenpenden terhadap variable dependen dan syarat regresi adalah harus memenuhi uji asumsi klasik dimana asumsi klasik merupakan uji pra-syarat yang harus dilakukan sebelum uji hipotesis. Dalam penelitian ini uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dimana asumsi yang harus terpenuhi adalah data harus berdistribusi normal serta bebas dari gangguan multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas, dimana pada penelitian ini hasil pengolahan data analisis regresi dipakai adalah dengan menggunakan software SPSS 20 (Statistical Package for Social Sciences).

#### Uji Normalitas

Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test, dimana data dikatakan berdistribusi normal jika nilai lebih dari 0,05. Berdasarkan output diketahui bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,991 > 0,05$ , sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 3.

Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		7
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7

	Std. Deviation	.03198394
Most Extreme Differences	Absolute	.165
	Positive	.134
	Negative	-.165
Kolmogorov-Smirnov Z		.435
Asymp. Sig. (2-tailed)		.991

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Sumber : Sumber : Data diolah, 2017

**Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas ‘bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen dan jika variable independen saling berkorelasi, maka variable – variable ini tidak orthogonal. Variable orthogonal adalah variable independen yang nilai korelasinya antar sesama variable independen sama dengan nol.

Untuk mendeteksi terjadi atau tidaknya gangguan multikoloniearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Apabila nilai VIF menunjukkan angka kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1 maka model regresi terbebas dari gangguan multikoliniearitas, dan apabila nilai VIF menunjukkan angka lebih dari 10 dan tolerance kurang dari 0,1 maka model regresi mengalami gangguan multikolinearitas.

Berdasarkan output uji multikolienaritas diketahui bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini memperoleh nilai tolerance  $0.775 > 0.1$  dan VIF  $1.290 < 10$ , sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas. Hasil uji multikolienaritas pada penelitian ini dapat dilihat pada berikut.

**Tabel 4.**  
**UjiMultikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	21.307	.525		40.582	.000		
1 BM	.089	.022	.345	3.983	.016	.775	1.290
PAD	.147	.016	.777	8.977	.001	.775	1.290

- a. Dependent Variable: PDRB

Sumber : Sumber : Data diolah,2017

**Uji Autikorelasi**

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) penyimpangan asumsi klasik autokorelasi model regresi yang baik adalah yang tidak adanya masalah atau tidakter dapat autokorelasi. Hasil uji autokorelasi menggunakan uji run test dengan dasar pengambilan keputusan ada atau tidak adanya autokorelasi adalah :

- a) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil < dari 0.05, maka terdapat gejala autokorelasi.
- b) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar > dari 0.05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi

Dari nilai output uji run test didapati nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada residual/ Unstandardized Residual memiliki nilai signifikansi sebesar 0.952 yang lebih besar dari 0.05, sehingga data tidak terjadi autokorelasi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.**  
**Uji Autikorelasi Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-.00087
Cases < Test Value	3
Cases >= Test Value	4
Total Cases	7
Number of Runs	5
Z	.061
Asymp. Sig. (2-tailed)	.952

a. Median

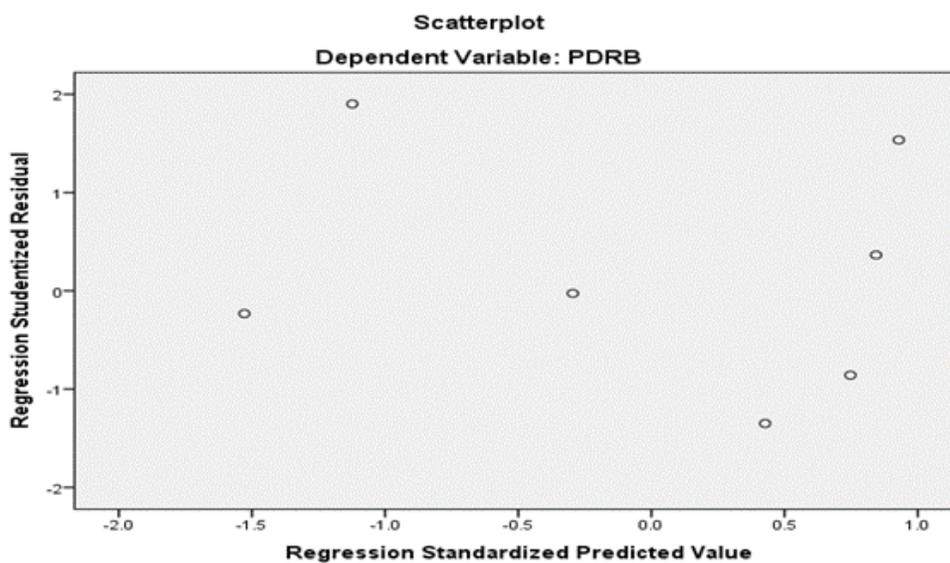
Sumber : Data diolah, 2017

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual (error) dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Dasar analisisnya adalah; (a) jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas, (b) jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dari hasil grafik scatterplots, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dan layak untuk dilanjutkan pada analisis regresi linear berganda. Untuk jelasnya dapat dilihat gambar.

**Gambar 3.**  
**Scatterplots Uji Heteroskedastisitas**



Sumber : Data diolah, 2017

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Berdasarkan hasil output analisis SPSS pada tabel koefisien regresi sebagaimana tabel berikut, maka dapat nilai konstanta sebesar 21.307 dan koefisien regresi belanja modal sebesar 0.089 dan koefisien regresi pendapatan asli daerah sebesar 0.147, sehingga dapat diinterpretasikan dalam persamaan regresi linear berganda yaikni;  $Y = 21,307 + 0,089X_1 + 0,147X_2 + e$ . Hal ini dapat dijelaskan bahwa :

- a) Nilai konstanta (a) adalah sebesar 21,307, artinya jika variabel Belanja Modal (X1) dan Pendapatan Asli Daerah (X2) bernilai nol (0), maka nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (Y) adalah sebesar 21,307
- b) Nilai koefisien b1 adalah sebesar 0,089, artinya jika nilai Pendapatan Asli Daerah (X2) adalah nol, maka setiap kenaikan Belanja Modal (X1) sebesar satu satuan akan meningkatkan nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto sebesar 0,089 satuan.
- c) Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah (X2) adalah sebesar 0,147, artinya jika nilai Belanja Modal (X1) adalah nol, maka setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (X2) sebesar satu satuan akan meningkatkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (Y) sebesar 0,147 satuan.

**Tabel 6.**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.307	.525		40.582	.000
	BM	.089	.022	.345	3.983	.016
	PAD	.147	.016	.777	8.977	.001
a. Dependent Variable: PDRB						

Sumber : Data diolah, 2017

**Koefisien Determinan**

Berdasarkan hasil output didapatkan nilai R2 sebesar 0.977, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh variable independen yaitu belanja modal (X1) dan Pendapatan Asli Daerah (X2) secara simultan terhadap variable dependen atau pertumbuhan Ekonomi (Y) adalah sebesar 97,7%, sedangkan sisanya 2,3 % dipengaruhi oleh variable lain.

**Tabel 7.**  
**Koefisien Determinasi (Model Summary)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.988 <sup>a</sup>	.977	.965	.03917

a. Predictors: (Constant), PAD, BM

Sumber : Data diolah, 2017

**Pengujian Hipotesa**

Hipotesa yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H<sub>0</sub> : Belanja modal dan Pendapatan asli daerah tidak mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamberamo Tengah
- H<sub>1</sub> : Belanja modal dan Pendapatan asli daerah tidak mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamberamo Tengah

1) Uji t (Parsial)

Analisis pengujian individual atau parsial (Uji t) diperlukan untuk mengetahui bahwa variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05 dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji ini didasarkan bahwa:

- Jika nilai sig. < 0,05, atau t hitung > t table, maka terdapat pengaruh variable X terhadap Y dan;

- Jika nilai sig. > 0,05 atau t hitung < t table, maka tidak terdapat pengaruh variable X terhadap variable Y

Untuk mencari t tabel adalah dengan cara  $t (\alpha/2; n-k-1)$  dimana  $\alpha =$  konstanta (0,05),  $n =$  jumlah sample,  $k =$  jumlah variable bebas (x), maka diperoleh  $t (0.05/ 2; 7-2-1)$  atau  $t (0.025 ; 4) = 2.776$ . Adapun output hasil uji T dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5. di atas. Dari tabel tersebut diambil kesimpulan untuk hipotesis uji t adalah sebagai berikut:

- Belanja Modal (X1) memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0.016 < 0.05$ , dan nilai t hitung sebesar  $3.983 > t$  table 2.776, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Belanja Modal (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) atau dengan kata lain  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
- Pendapatan Asli Daerah (X2) memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0.001 < 0.05$ , dan nilai hitung sebesar  $8.977 > t$  table 2.776, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X2) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) dengan kata lain  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

## 2) Uji F (Simultan)

Uji simultan (uji F) bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen (bebas) mempengaruhi variabel dependen (terikat) secara bersama-sama atau simultan. Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan adalah:

- Jika nilai sig < 0,05, atau F hitung > F table, maka terdapat pengaruh variable X terhadap Y.
- Jika nilai sig > 0,05 atau F hitung < F table, maka tidak terdapat pengaruh variable X terhadap variable Y

Untuk mencari F tabel rumus yang digunakan  $F \text{ table} = F(k;n-k)$  dimana  $n =$  jumlah sample,  $k =$  jumlah variable bebas (x), sehingga dimasukkan  $F \text{ tabel} = F (2; 7-2)$  atau  $F = (2; 4) = 6,94$ . Adapun output uji F dari hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah, dimana berdasarkan output diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0.001 < 0.05$  atau F hitung sebesar  $84,054 > F$  tabel sebesar 6.94, maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal (X1) dan Pendapatan Asli Daerah (X2) berpengaruh secara simultan atau memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

**Tabel 8.**

**Uji F ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.258	2	.129	84.054	.001 <sup>b</sup>
1 Residual	.006	4	.002		
Total	.264	6			

a. Dependent Variable: PDRB

b. Predictors: (Constant), PAD, BM

Sumber : Data diolah, 2017

## Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung (Path Analysis)

Untuk melihat secara proporsional pengaruh langsung dan tidak langsung baik dari belanja modal (X1) dan pendapatan asli daerah (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y), maka dapat dilakukan dengan analisis jalur (path analysis) dengan menentukan model diagram jalur yang selanjutnya dapat dilihat koefisien regresi belanja modal (X1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y), pendapatan asli daerah (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) dan pendapatan asli daerah (X2) terhadap belanja modal (X1), dimana hasil spss untuk koefisien regresi dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

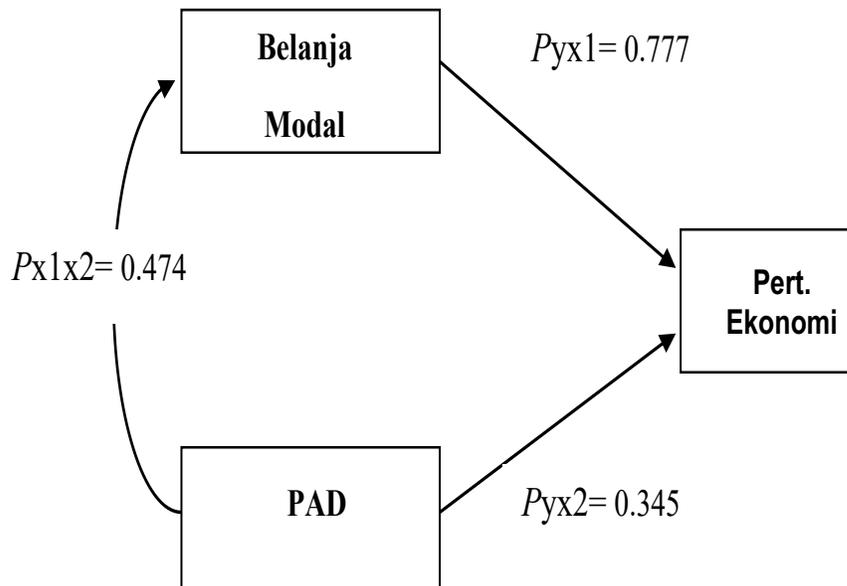
**Tabel 9.**

**Uji Korelasi  
Correlations**

		BM	PAD	PDRB
BM	Pearson Correlation	1	.474	.713
	Sig. (2-tailed)		.283	.072
	N	7	7	7
PAD	Pearson Correlation	.474	1	.941**
	Sig. (2-tailed)	.283		.002
	N	7	7	7
PDR B	Pearson Correlation	.713	.941**	1
	Sig. (2-tailed)	.072	.002	
	N	7	7	7

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
 Sumber : Data diolah, 2017

**Gambar 4.**  
**Diagram Jalur Hubungan Antar Variabel**



Sumber : Data diolah, 2017

Dari diagram jalur tersebut dibuatlah table hubungan pengaruh langsung dan tidak langsung serta total pengaruh antara variable belanja modal, Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto sebagaimana pada tabel berikut. Dengan melihat tabel tersebut di bawah, maka dapat dijelaskan bahwa:

- Pengaruh langsung belanja modal (x1) terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0.119, dan pengaruh tidak langsung belanja modal melalui pendapatan asli daerah (x2) terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0.127, sedangkan total pengaruh dari belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0.246 atau 24.60 persen.
- Pengaruh langsung pendapatan asli daerah (x2) terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0.604 dan pengaruh tidak langsung pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal (x1) adalah sebesar 0.127, sedangkan total pengaruh dari pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0.731 atau sebesar 73.10 persen.
- Total pengaruh oleh belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0.977 atau sama dengan besarnya nilai R Square (R<sup>2</sup>).

**Tabel 10.**  
**Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung serta Total Pengaruh Variabel**

Variabel	Koefisien Beta	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung		Total Pengaruh Tidak Langsung	Total Pengaruh
			X1	X2		
X1	0.345	0.119		0.127	0.127	<b>0.246</b>
X2	0.777	0.604	0.127		0.127	<b>0.731</b>
<b>Total Pengaruh</b>						<b>0.977</b>

Sumber : Data diolah, 2017

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatnya belanja modal berarti pemerintah Kabupaten Mamberamo tengah daerah telah melakukan upaya peningkatan pembangunan infrastruktur untuk dapat digunakan oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan produktifitas masyarakat dalam melakukan pekerjaannya, dengan ini masyarakat dapat membayar segala macam bentuk pajak dan retribusi daerah yang nantinya akan meningkatkan pendapatan asli daerah, peningkatan pendapatan asli daerah ini juga yang kemudian akan meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam memenuhi tuntutan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita. Secara tradisional pertumbuhan ekonomi ditunjukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah/ PDRB. Pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung dengan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi. Biasanya jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan belanja modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan pada tahun anggaran. Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan tersebut. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita (Boediono, 1985). Kabupaten Mamberamo Tengah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan membaiknya ekonomi global dan domestik. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka belanja modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah pertumbuhan ekonomi maka belanja modal akan semakin rendah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2014) meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Biasanya bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi belanja modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada tahun anggaran.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Belanja modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamberamo Tengah dalam perkembangannya cenderung mengalami peningkatan selama periode penelitian;
2. Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan demikian juga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

### **Saran**

1. Pemerintah daerah perlu untuk mengalokasi proporsi belanja daerah yang agak besar pada belanja modal, karena kebijakan ini pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah;
2. Perlu ada ekstensifikasi dan intensifikasi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
3. Penggunaan belanja daerah khususnya belanja modal diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan ekonomi produktif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba;
- Arsyad, Lincolin. (2004). Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat. Yogyakarta: STIE YKPN;
- Darsono, I.L. (2013). Pengaruh Alokasi Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 1(8): 11-21;
- Davey, K. J. (1988). Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga. Terjemahan Anarullah. Dkk. Jakarta: UI-Press;
- Edison, P. H. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Toba Samosir. Tesis Program Studi Akuntansi Sekolah Pascasarjana Universitas SumateraUtara;
- Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS. Edisi 7. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro;
- Koswara, E. (2001). Otonomi Daerah: Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat. Jakarta: Yayasan Pariba;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun (2006) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun (2007) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun (2006) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rahardja Prathama & Manurung Mandala. (2008). Teori Ekonomi Makro. Jakarta: LPFEUI;
- RTRW Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun (2016 – 2036);
- Simamora, Boy D. P; Riani, Ida A. P dan Patinggi, P. N. (2017). Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Derajat Kemandirian Fiskal Kabupaten Merauke. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Volume IV No. 3, Desember 2017;
- Simanjuntak R. A. (2003). Implementasi Desentralisasi Fiskal: Problema, Pros-pek, dan Kebijakan. Jakarta:LPEM FE-UI;
- Sugiono, S. (2014). Pengaruh Moderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Hubungan Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 2 (3): 1-27;
- Todaro M. P. dan Smith S. C. (2003). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jilid 2. (Penterjemah) Haris Munandar. Jakarta: Erlangga;
- Urip, Transna P. (2016). "Analisis Potensi Asset Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Jayapura." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, vol. 1, no. 2, 2016.
- Wondiwoi, Arnold; Hafizrianda, Yundy; De Quelyoe F. Y. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapasitas Fiskal Di Kota Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Volume IV No. 2, Agustus 2017.